

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Ani Sri Rahayu. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta ,penerbit Rineka Cipta.
- JJ.Von Schimid, 1998, *Pemikiran Tentang Negara Hukum*, Jakrta : Erlangga.
- Josep Riwu Kaho. 2005. *prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mariati Rahman. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Muhammad Alfisyahrin. 2017 *Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang. 1997. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan, Kondisi dan Tantangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tjahya Supriana. 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Yeremias Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Zainuddin Ali.2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal

- Febriharini,Mahmuda Pancawisma. 2016. “*Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan*” Jurnal ilmiah UNTAG semarang, Vol 5, No 2.

Ida Fitriani. 2017. "Evaluasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan" Jurnal Renaissance .vol. 2

Rahma Yunita, 2017. "Studi Pelayanan Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliurang Kabupaten Kutai Timur", PeJournal Pemerintahan Integratif UNMUL, volume 5, nomor 3.

Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, & Ignatius Adiwidjaja, 2016. "Implementasi Sitem Informasi Administrasi Kependudukan", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNITRI, volume 5, nomor 1.

Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, & Isnaini, 2017. "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dair", Jurnal Administrasi Publik UMA.

Nur Ayyul Hisbani, dkk, 2015. "Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang", Jurnal Administrasi Publik, Voume 1, Nomor 3.

Robi Kurniawan Cahyadi, 2016. "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah" Jurnal FH Unila Vol.10, No. 3.

Agusta Ari Wibowo, Setiahadi Pratomo, 2021. "Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Era Masyarakat Informasi" Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783, Volume 3 Nomor 1.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Ketetapan MPR No.VI/MPR/2002

PP No. 25 Tahun 2000 dan Keppres No. 102 serta No. 109 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

Permendagri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 Tentang

Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang

Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4).

Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Online).

Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 192 Tentang Inovasi Aplikasi Online “*SMART DUKCAPIL*” Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Internet

<https://padek.jawapos.com/sumbar/limapuluh-kota/05/05/2020/distribusi-bantuan-kabupaten-limapuluhkota-dinilai-gunakan-data-lama/>

